

EVALUASI KEBIJAKAN PENJADWALAN PEMADAMAN LISTRIK BERGILIR PADA JAM ISTIRAHAT MELALUI PERSPEKTIF KOMUNIKASI KRISIS: STUDI PADA PENGGUNA RUMAH TANGGA

Rosya Amalia¹, Dewi Rahmawati², Tria Patrianti³

Universitas Muhammadiyah Jakarta ^{1,2,3}

Email: rosya.amalia@student.umj.ac.id¹, dewi.rahmawati@student.umj.ac.id², triapadmadisastra@yahoo.com³

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 7 Bulan : Juli Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>Rolling blackouts implemented by Indonesia's state electricity utility (PLN) throughout mid-2026, particularly those scheduled during evening and night hours that overlap with household rest time, have raised public concern not only about service reliability but also about the quality of crisis communication accompanying the policy. This study evaluates PLN's crisis communication practices during rolling blackout events in several regions of Indonesia (Java, West Kalimantan, and South-Central Kalimantan) between June and July 2026, using Coombs' Situational Crisis Communication Theory (SCCT) and Benoit's Image Repair Theory as analytical lenses. Using a qualitative case-study approach with media content analysis of news reports, official statements, and publicly recorded household responses, the study finds that PLN predominantly relied on justification and rebuild strategies, technical explanations of generator disturbances combined with public apologies, while proactive notification channels such as WhatsApp and social media were frequently issued at times poorly aligned with household rest hours, which reduced the perceived transparency and timeliness of the communication. The study argues that crisis communication protocols for essential-service disruptions must explicitly account for the timing of message delivery relative to the audience's daily rhythm, not only the content and tone of the message. Practical recommendations for utility communication management are offered.</i> Keyword: crisis communication, rolling blackout, scct, household users, pln

Abstrak

Pemadaman listrik bergilir yang diterapkan oleh PT PLN (Persero) sepanjang pertengahan tahun 2026, khususnya yang dijadwalkan pada jam malam yang bersinggungan dengan waktu istirahat rumah tangga, memunculkan keresahan publik bukan hanya terkait keandalan layanan, tetapi juga kualitas komunikasi krisis yang menyertainya. Penelitian ini mengevaluasi praktik komunikasi krisis PLN selama peristiwa pemadaman bergilir di beberapa wilayah Indonesia (Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan-Tengah) pada periode Juni-Juli 2026, dengan menggunakan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dari Coombs dan Image Repair Theory dari Benoit sebagai pisau analisis. Melalui pendekatan studi kasus kualitatif dengan analisis isi media terhadap pemberitaan, pernyataan resmi, dan respons warga yang terekam di ruang publik, penelitian ini menemukan bahwa PLN dominan menggunakan strategi justifikasi dan rebuild, yakni penjelasan teknis mengenai gangguan pembangkit yang dikombinasikan dengan permintaan maaf publik, sementara kanal pemberitahuan proaktif seperti WhatsApp dan media sosial kerap disampaikan pada waktu yang kurang selaras dengan jam istirahat rumah tangga, sehingga menurunkan persepsi transparansi dan

ketepatan waktu komunikasi. Penelitian ini berargumen bahwa protokol komunikasi krisis untuk gangguan layanan esensial perlu secara eksplisit mempertimbangkan waktu penyampaian pesan yang selaras dengan ritme keseharian audiens, bukan hanya isi dan nada pesan. Rekomendasi praktis bagi manajemen komunikasi PLN turut disampaikan.

Kata Kunci: komunikasi krisis, pemadaman bergilir, scct, pengguna rumah tangga, pln

A. PENDAHULUAN

Sepanjang triwulan kedua tahun 2026, masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia kembali menghadapi pemadaman listrik bergilir dalam skala yang cukup meluas. Di Pulau Jawa, PT PLN (Persero) mengonfirmasi bahwa pemadaman bergilir yang terjadi sejak pertengahan Juni 2026 dipicu oleh gangguan teknis pada dua unit pembangkit besar milik produsen listrik swasta (independent power producer/IPP) (Tempo.co, 2026). Direktur Utama PLN bahkan secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas gangguan tersebut (Tempo.co, 2026), sementara Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN menegaskan bahwa manajemen beban bersifat sementara dan akan dihentikan bertahap seiring pulihnya pasokan (Listrik Indonesia, 2026; Kompas TV, 2026). Pola serupa terjadi di Kalimantan, di mana PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat membagi pemadaman di Kota Pontianak ke dalam tiga sif akibat penurunan kapasitas mesin pembangkit yang diperparah cuaca panas (Detik.com, 2026; Kompas.com, 2026), sedangkan PLN ULP Batulicin di Tanah Bumbu dan PLN ULP Palangka Raya Barat mengalami gangguan pada unit Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) (Interaksi.co, 2026; Energika.id, 2026).

Yang membedakan rangkaian peristiwa ini dari pemadaman teknis biasa adalah waktu terjadinya. Sejumlah sif pemadaman dijadwalkan hingga larut malam, bahkan ada wilayah yang mengalami pemadaman dua kali berturut-turut pada malam hari sehingga, menurut penuturan salah seorang warga terdampak, waktu istirahat keluarganya sangat terganggu (Interaksi.co, 2026). Di ranah usaha rumah tangga, gangguan pasokan listrik pada jam malam dilaporkan turut merusak stok pangan beku milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga berdampak pada omzet (Energika.id, 2026). Kondisi ini menempatkan pemadaman bergilir bukan sekadar persoalan teknis kelistrikan, melainkan juga persoalan komunikasi krisis: bagaimana perusahaan penyedia layanan esensial menyampaikan informasi gangguan, permintaan maaf, dan kepastian pemulihan kepada publik yang keseharian dan waktu istirahatnya terdampak langsung.

Komunikasi krisis dalam konteks ini menjadi relevan karena tiga alasan. Pertama, informasi pemadaman umumnya disebarkan PLN melalui media sosial dan pesan WhatsApp yang kemudian diteruskan warga secara berjenjang ke berbagai grup percakapan (Listrik Indonesia, 2026), sebuah pola distribusi informasi yang bergantung pada relai warga dan rentan terlambat sampai ke rumah tangga yang justru tengah beristirahat. Kedua, muncul disonansi naratif di ruang publik: di satu sisi PLN maupun Kementerian ESDM menegaskan sistem kelistrikan utama masih terkendali dan tidak terkait krisis pasokan batu bara (Interaksi.co, 2026; Tempo.co, 2026), namun di sisi lain sebagian warganet meragukan penjelasan tersebut dan secara terbuka menyebutnya tidak masuk akal (Listrik Indonesia, 2026). Ketiga, respons PLN yang berulang kali menampilkan pola permintaan maaf dan penjelasan teknis yang relatif seragam di berbagai wilayah mengindikasikan adanya semacam protokol komunikasi krisis yang dapat dievaluasi secara sistematis, alih-alih dipandang sebagai reaksi ad hoc di masing-masing daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: bagaimana strategi komunikasi krisis yang digunakan PLN dalam merespons pemadaman listrik bergilir yang bersinggungan dengan jam istirahat rumah tangga, dan sejauh mana strategi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip komunikasi krisis yang efektif ditinjau dari perspektif pengguna rumah tangga terdampak? Untuk menjawabnya, penelitian ini menggunakan dua kerangka teori yang saling melengkapi. Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dari Coombs (2007) menekankan bahwa strategi respons krisis (deny, diminish, rebuild, reinforce) semestinya disesuaikan dengan tingkat atribusi tanggung jawab krisis yang dipersepsikan publik, sedangkan Image Repair Theory dari Benoit (1997) menyoroti bagaimana organisasi berupaya memulihkan citra melalui strategi seperti penyangkalan, pengalihan tanggung jawab, pengurangan keofensifan, tindakan korektif, dan permohonan maaf (mortifikasi). Penelitian ini juga merujuk pada prinsip komunikasi krisis yang tepat waktu, jujur, dan konsisten sebagaimana ditekankan Seeger, Sellnow, dan Ulmer (2003) dalam kajian komunikasi krisis dan bencana. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi pola strategi komunikasi krisis yang digunakan PLN selama episode pemadaman bergilir jam istirahat pada periode Juni-Juli 2026, dan (2) mengevaluasi kesesuaian pola tersebut dengan kebutuhan informasi pengguna rumah tangga, khususnya dari sisi ketepatan waktu penyampaian pesan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (case study), yang bertujuan memahami secara mendalam bagaimana suatu peristiwa komunikasi berlangsung dalam konteks nyata (Yin, 2018). Unit analisis penelitian adalah teks-teks komunikasi krisis yang diproduksi PLN serta respons publik yang menyertainya, dengan pengguna rumah tangga di wilayah terdampak sebagai kelompok sasaran perspektif evaluasi.

Data penelitian bersumber dari dokumen publik, yakni pemberitaan media daring nasional dan lokal (antara lain Kompas.com, Kompas TV, Tempo.co, Detik.com, Listrik Indonesia, Interaksi.co, Energika.id, dan Suara Surabaya) yang memuat pernyataan resmi manajemen komunikasi PLN di tingkat pusat maupun unit induk distribusi/unit layanan pelanggan, serta kutipan tanggapan warga terdampak yang termuat dalam pemberitaan tersebut, mencakup periode pertengahan Juni hingga awal Juli 2026. Pemilihan sumber didasarkan pada relevansi tematik (memuat unsur jadwal pemadaman pada jam istirahat, pernyataan resmi PLN, dan/atau reaksi warga) dan keterwakilan wilayah (Jawa dan Kalimantan sebagai dua area dengan pemberitaan paling intensif pada periode tersebut).

Teknik analisis data menggunakan analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) dengan tahapan: (1) inventarisasi seluruh pernyataan resmi PLN dan kutipan warga dari sumber terpilih; (2) pengodean pernyataan tersebut ke dalam kategori strategi respons krisis berdasarkan SCCT (deny, diminish, rebuild, reinforce) dan Image Repair Theory (denial, evasion of responsibility, reducing offensiveness, corrective action, mortification); (3) pemetaan waktu penyampaian pesan terhadap waktu dan durasi pemadaman untuk menilai kesesuaiannya dengan jam istirahat rumah tangga; dan (4) interpretasi tematik terhadap reaksi warga sebagai indikator persepsi pengguna rumah tangga atas efektivitas komunikasi tersebut.

Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis yang perlu digaris bawahi. Karena data bersumber dari dokumen media dan bukan dari survei atau wawancara langsung terhadap sampel rumah tangga yang representatif, temuan mengenai “persepsi pengguna rumah tangga” dalam penelitian ini bersifat indikatif, direkonstruksi dari kutipan warga yang terekam media, dan tidak dapat digeneralisasi secara statistik. Keterbatasan ini secara eksplisit dijadikan agenda untuk penelitian lanjutan yang bersifat kuantitatif atau mixed-method dengan data primer, sebagaimana didiskusikan pada bagian kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Kasus Pemadaman Bergilir pada Jam Istirahat

Temuan menunjukkan bahwa pemadaman bergilir pada periode Juni-Juli 2026 tersebar di sedikitnya empat klaster wilayah dengan karakteristik jadwal yang beririsan dengan waktu istirahat rumah tangga. Di Jawa Timur, durasi pemadaman dilaporkan berkisar dua hingga empat jam dan disampaikan kepada pelanggan terdampak melalui pesan WhatsApp (Suara Surabaya, 2026). Di Jawa Tengah dan Yogyakarta, durasi pemadaman berkisar tiga hingga enam jam dengan jadwal yang berbeda-beda di setiap daerah dan berpotensi berubah sewaktu-waktu (AFU.id, 2026). Di Pontianak, Kalimantan Barat, pemadaman dibagi tiga sif @ lima jam, dengan sif ketiga berlangsung pukul 17.30 hingga 22.30 WIB yang jelas bersinggungan dengan jam makan malam dan awal waktu istirahat keluarga (Kompas.com, 2026). Sementara di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, warga melaporkan pemadaman terjadi dua kali berturut-turut pada malam hari (Interaksi.co, 2026), dan di Palangka Raya sesi pemadaman pagi berlangsung sekitar lima jam dengan sesi lanjutan hingga sore (Energika.id, 2026).

Pola ini memperlihatkan bahwa jam istirahat rumah tangga, yang lazim dipahami sebagai rentang sore hingga malam hari, secara konsisten menjadi bagian dari jadwal pemadaman di berbagai wilayah, bukan pengecualian yang jarang terjadi. Hal ini menjadikan dimensi waktu bukan hanya variabel teknis operasional PLN, melainkan variabel yang secara langsung membentuk pengalaman krisis yang dirasakan pengguna rumah tangga.

b. Strategi Komunikasi Krisis PLN: Pola Justifikasi dan Rebuild

Dengan mengacu pada kerangka SCCT, pernyataan resmi PLN di berbagai wilayah menunjukkan pola yang relatif konsisten dan dapat dikelompokkan ke dalam dua klaster strategi. Pertama, strategi diminish (justifikasi/excuse), yaitu penjelasan teknis yang menempatkan penyebab krisis di luar kendali langsung manajemen, misalnya gangguan pada mesin pembangkit akibat cuaca panas di Pontianak (Kompas.com, 2026), kendala teknis pada unit PLTGU di Tanah Bumbu dan Palangka Raya (Interaksi.co, 2026; Energika.id, 2026), atau gangguan pada dua unit pembangkit swasta (IPP) di Jawa (Tempo.co, 2026). Pola ini secara implisit memposisikan PLN pada klaster krisis “kecelakaan” (accidental cluster) dalam terminologi SCCT, yakni krisis yang dipicu faktor eksternal atau teknis di luar kesengajaan organisasi, sehingga menurut logika SCCT strategi diminish dipandang memadai dan tidak memerlukan strategi rebuild yang lebih berat seperti kompensasi penuh.

Kedua, strategi rebuild dalam bentuk mortifikasi atau permintaan maaf eksplisit, yang muncul berulang di berbagai wilayah: Direktur Utama PLN menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya atas gangguan di Jawa (Tempo.co, 2026); ungkapan permintaan maaf dalam bahasa Jawa turut digunakan sebagai penanda kedekatan budaya dengan publik terdampak (Listrik Indonesia, 2026); dan manajemen PLN ULP Batulicin turut menyampaikan permohonan maaf mendalam atas ketidaknyamanan warga (Interaksi.co, 2026). Pemakaian mortifikasi yang konsisten di berbagai level organisasi, dari direktur utama hingga manajer unit layanan pelanggan tingkat kabupaten, menunjukkan bahwa permintaan maaf telah menjadi elemen standar dalam naskah komunikasi krisis PLN, sejalan dengan anjuran Image Repair Theory bahwa mortifikasi efektif meredam persepsi negatif publik ketika disampaikan tulus dan konsisten (Benoit, 1997).

Selain dua pola dominan tersebut, ditemukan pula elemen strategi denial yang bersifat spesifik dan terbatas, yakni penyangkalan terhadap satu isu tertentu—ketersediaan pasokan energi primer/batu bara—yang secara berulang ditegaskan aman dan tidak terkait dengan pemadaman (Interaksi.co, 2026; Kompas.com, 2026). Penyangkalan yang menysar isu spesifik ini, alih-alih menyangkal krisis pemadaman itu sendiri, mengindikasikan bahwa PLN berupaya mengendalikan narasi publik di tengah beredarnya spekulasi tentang krisis pasokan energi yang lebih luas, sekaligus menghindari kesan bahwa persoalan bersifat struktural dan berkepanjangan.

c. Kesenjangan Waktu Penyampaian Pesan terhadap Jam Istirahat

Temuan paling relevan bagi tujuan penelitian ini adalah kesenjangan antara waktu penyampaian informasi krisis dan waktu istirahat rumah tangga yang justru menjadi objek dampak pemadaman. Kanal utama penyebaran informasi jadwal pemadaman adalah media sosial dan WhatsApp, dengan pola penyebaran yang bergantung pada relai warga dan tokoh setempat ke berbagai grup percakapan (Listrik Indonesia, 2026), serta laporan bahwa unit layanan pelanggan telah menyampaikan informasi pemadaman kepada pelanggan terdampak melalui pesan WhatsApp (Suara Surabaya, 2026). Model distribusi berjenjang semacam ini secara struktural rentan terhadap keterlambatan (lag), terutama pada sif pemadaman sore-malam ketika rumah tangga sudah memasuki rutinitas istirahat dan intensitas pemantauan media sosial cenderung menurun.

Dari perspektif SCCT maupun prinsip komunikasi krisis yang menekankan ketepatan waktu (timeliness) sebagai salah satu pilar utama di samping kejujuran dan konsistensi pesan (Seeger, Sellnow, & Ulmer, 2003), pola ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kualitas

isi pesan (yang secara umum sudah memuat unsur penjelasan, permintaan maaf, dan kepastian pemulihan) dengan kualitas saluran dan waktu penyampaiannya. Dengan kata lain, PLN relatif berhasil merumuskan pesan yang secara tekstual sesuai kaidah komunikasi krisis, namun arsitektur distribusinya belum tentu menjangkau audiens rumah tangga pada saat yang paling dibutuhkan, yaitu sebelum atau tepat pada saat pemadaman dimulai, bukan sesudahnya.

d. Persepsi Pengguna Rumah Tangga: Antara Pemakluman dan Ketidakpercayaan

Respons warga yang terekam dalam pemberitaan memperlihatkan spektrum persepsi yang terbelah. Di satu kutub, sejumlah warga menyampaikan keluhan personal yang menegaskan dampak konkret pada waktu istirahat keluarga, sebagaimana disampaikan salah seorang warga Tanah Bumbu bahwa pemadaman dua kali berturut-turut pada malam hari sangat mengganggu waktu istirahatnya (Interaksi.co, 2026), sementara pelaku usaha rumah tangga di Palangka Raya mengalami kerugian akibat kerusakan stok pangan beku (Energika.id, 2026). Di kutub lain, muncul pula komentar warganet yang secara terbuka meragukan kebenaran penjelasan resmi PLN, termasuk yang menilai penjelasan “pemeliharaan” tidak masuk akal dan menyebutnya sebagai kebohongan (Listrik Indonesia, 2026).

Ditinjau dari SCCT, respons semacam ini merupakan indikasi bahwa strategi diminish yang digunakan PLN belum sepenuhnya berhasil menurunkan atribusi tanggung jawab krisis di mata sebagian publik. Ketika pemadaman berulang di wilayah yang sama dalam rentang waktu berdekatan, sebagaimana dikeluhkan warga Yogyakarta yang menyebut pemadaman telah berlangsung lama tanpa penjelasan yang memuaskan (Listrik Indonesia, 2026), persepsi publik cenderung bergeser dari klaster krisis “kecelakaan” menuju klaster “dapat dicegah” (preventable cluster), yang menurut SCCT semestinya direspons dengan strategi rebuild yang lebih substantif, seperti kompensasi konkret, bukan sekadar permintaan maaf dan penjelasan teknis yang berulang. Sinyal ke arah ini sesungguhnya sudah ditangkap oleh otoritas terkait, misalnya melalui pembahasan skema kompensasi dan subsidi antara Kementerian ESDM dan PLN (Kompas TV, 2026), namun langkah tersebut belum secara eksplisit dikomunikasikan sebagai bagian dari respons krisis kepada rumah tangga terdampak pada level unit layanan pelanggan.

e. Implikasi bagi Manajemen Komunikasi Krisis Layanan Esensial

Berdasarkan temuan di atas, evaluasi kebijakan penjadwalan pemadaman bergilir pada jam istirahat dari perspektif komunikasi krisis menghasilkan tiga implikasi praktis. Pertama,

isi pesan krisis PLN secara umum telah memenuhi unsur dasar SCCT dan Image Repair Theory (penjelasan sebab, permintaan maaf, kepastian pemulihan), sehingga area perbaikan utama bukan pada narasi, melainkan pada arsitektur waktu dan saluran distribusi pesan agar menjangkau rumah tangga sebelum jam istirahat dimulai, bukan setelah dampak dirasakan. Kedua, diperlukan diferensiasi strategi respons berdasarkan durasi dan frekuensi pemadaman di suatu wilayah: pemadaman tunggal yang bersifat insidental dapat cukup direspons dengan strategi diminish dan mortifikasi, sedangkan pemadaman berulang dalam rentang waktu berdekatan memerlukan strategi rebuild yang lebih substantif, termasuk kompensasi yang dikomunikasikan secara transparan hingga ke tingkat pelanggan rumah tangga. Ketiga, mengingat jam istirahat merupakan waktu ketika masyarakat paling rentan terhadap gangguan layanan esensial namun paling kurang terpantau melalui kanal digital pasif, PLN perlu mempertimbangkan mekanisme notifikasi proaktif tambahan (misalnya panggilan otomatis atau pengumuman melalui pengeras suara lingkungan) khusus untuk sif pemadaman yang beririsan dengan jam istirahat, alih-alih bergantung sepenuhnya pada relai informasi berjenjang melalui media sosial dan grup percakapan warga.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi krisis PLN dalam merespons pemadaman listrik bergilir pada periode Juni-Juli 2026 didominasi oleh kombinasi strategi diminish (penjelasan teknis atas gangguan pembangkit) dan rebuild dalam bentuk mortifikasi (permintaan maaf) yang secara konsisten diterapkan di berbagai wilayah dan tingkatan organisasi, disertai elemen denial yang bersifat spesifik untuk menepis spekulasi krisis pasokan energi primer. Dari sisi isi pesan, pola ini secara umum selaras dengan prinsip dasar SCCT dan Image Repair Theory. Namun, evaluasi dari perspektif pengguna rumah tangga menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada isi pesan, melainkan pada kesenjangan waktu dan saluran penyampaian pesan terhadap jam istirahat rumah tangga yang justru menjadi waktu paling terdampak, serta pada belum memadainya diferensiasi strategi ketika pemadaman berulang sehingga berisiko menggeser persepsi publik ke arah krisis yang dianggap dapat dicegah.

Secara akademis, penelitian ini menegaskan pentingnya menambahkan dimensi ketepatan waktu penyampaian pesan (*message timing relative to audience routine*) sebagai unsur evaluasi yang setara dengan isi dan strategi pesan dalam kajian komunikasi krisis pada sektor layanan esensial. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar PLN

mengembangkan protokol notifikasi krisis yang secara eksplisit memperhitungkan jam istirahat rumah tangga sebagai variabel perencanaan, bukan hanya variabel operasional kelistrikan. Mengingat keterbatasan penelitian ini yang bertumpu pada analisis isi media dan bukan data primer, penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan survei atau wawancara langsung terhadap sampel rumah tangga terdampak di berbagai wilayah guna mengukur secara lebih terukur tingkat kepuasan, kepercayaan, dan preferensi saluran komunikasi krisis yang diharapkan masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- AFU.id. (2026, 23 Juni). PLN lanjutkan pemadaman bergilir hari ini, berikut jadwal dan wilayah terdampak. <https://afu.id/nasional/pln-lanjutkan-pemadaman-bergilir-hari-ini-berikut-jadwal-dan-wilayah-terdampak>
- Benoit, W. L. (1997). Image repair discourse and crisis communication. *Public Relations Review*, 23(2), 177–186.
- Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. *Corporate Reputation Review*, 10(3), 163–176.
- Detik.com. (2026, 4 Juli). PLN bagi pemadaman listrik di Pontianak jadi 3 sif, masing-masing 5 jam. <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8559524/pln-bagi-pemadaman-listrik-di-pontianak-jadi-3-sif-masing-masing-5-jam>
- Energika.id. (2026, 3 Juli). PLTGU gangguan, listrik Palangka Raya padam bergilir 3 Juli 2026. <https://umum.energika.id/detail/51043/pltgu-gangguan-listrik-palangka-raja-padam-bergilir-3-juli-2026>
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing public relations*. Holt, Rinehart and Winston.
- Interaksi.co. (2026, 30 Juni). Imbas gangguan PLTGU, ini rincian jadwal pemadaman listrik di Tanah Bumbu. <https://interaksi.co/imbas-gangguan-pltgu-ini-rincian-jadwal-pemadaman-listrik-di-tanah-bumbu/>
- Kompas.com. (2026, 3 Juli). PLN sebut pemadaman listrik di Pontianak dipicu gangguan mesin akibat cuaca panas. <https://regional.kompas.com/read/2026/07/03/183043078/pln-sebut-pemadaman-listrik-di-pontianak-dipicu-gangguan-mesin-akibat-cuaca>
- Kompas TV. (2026, 19 Juni). Sampai kapan pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa berlangsung? Ini kata PLN. <https://www.kompas.tv/nasional/675930/sampai-kapan->

pemadaman-listrik-bergilir-di-pulau-jawa-berlangsung-ini-kata-pln

Listrik Indonesia. (2026, 19 Juni). Pemadaman listrik di Jawa: PLN sampaikan Nyuwun Ngapunten. <https://listrikindonesia.com/detail/20404/pemadaman-bergilir-di-jawa-pln-sampaikan-nyuwun-ngapunten>

Seeger, M. W., Sellnow, T. L., & Ulmer, R. R. (2003). *Communication and organizational crisis*. Praeger.

Suara Surabaya. (2026, 19 Juni). PLN Jawa Timur: Pemadaman listrik bergilir hari ini maksimal empat jam. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2026/pln-jawa-timur-pemadaman-listrik-bergilir-hari-ini-maksimal-empat-jam/>

Tempo.co. (2026, 19 Juni). Ini penyebab pemadaman bergilir di Jawa versi PLN. <https://www.tempo.co/ekonomi/ini-penyebab-pemadaman-bergilir-di-jawa-versi-pln-2270424>

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.